

KONSOLIDASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA CABANG SURABAYA DALAM PEMILU TAHUN 1982

FAHMI ACHMAD VELAYATI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : tleg63@yahoo.com

Septina Alrianingrum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Hasil pemilu tahun 1977 di Surabaya sendiri PDI menjadi partai ketiga setelah Golkar dan PPP dalam perolehan suara, dengan perolehan suara sebesar 138.587. Dari sinilah dapat di ambil permasalahan pokok tentang hasil suara PDI di Surabaya yang tidak stabil, kadang presentasenya naik dan kadang turun, dan perlu di ketahuai, juga karena adanya konflik internal partai PDI Surabaya yang tidak sepaham ideloginya dengan anggota lainnya. Oleh karena itu PDI Surabaya menjadi topik hangat yang dibicarakan media karena banyak konflik yang membuat tubuh partai yang ada di Surabaya pasang surut dalam pemilu tahun 1982

Berdasarkan latar belakang peristiwa tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut : 1) alasan konsolidasi internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Surabaya dalam pemilihan umum tahun 1982, 2) proses konsolidasi internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam pemilihan umum di Surabaya pada pemilu tahun 1982, 3) hasil konsolidasi dari PDI Surabaya dalam pemilu tahun 1982

Konsolidasi internal PDI Surabaya selama Pemilu 1982 lebih disibukan kepada persoalan pergeseran struktur DPC PDI Surabaya yang melibatkan Soepardi dengan Didiek Rahadi berujung terhadap dicaretakernya DPC PDI Surabaya. Soetam ditunjuk sebagai caretaker DPC PDI Surabaya sampai penyelenggaraan konfercab. Konfercab yang terselenggara 31 Januari menghasilkan Soetam Sebagai ketua DPC PDI, yang bertugas sampai Selesaiannya Pemilu 1982. Dalam pemilu 1982 DPC PDI Surabaya Soetam menargetkan 7 kursi DPRD Tk II Surabaya, serta membuat strategi kampanye malam hari untuk mengakomodasi massa pendukung PDI serta mengutamakan kampanye dari kelurahan (kampanye dari bawah). Kampanye PDI sendiri berlangsung dengan sederhana dan diakhir dengan kampanye akbar PDI di Gelora Tambak Sari pada tanggal 26 April. Hasil perolehan suara PDI Surabaya pada Pemilu 1982 178.837, dengan perolehan kursi 6 di DPRD Tk II Surabaya

Kata Kunci : Konsolidasi, Pemilu 1982, PDI, Surabaya

ABSTRACT

The election results in 1977 in Surabaya itself PDI became the third party after Golkar and PPP in the vote, with a vote of 138,587. From here it can be taken the main problem about the results of PDI votes in Surabaya are unstable, sometimes presentasenya rise and sometimes down, and need to know, also because of internal conflict PDI Surabaya party who disagree with its ideology with other members. Therefore PDI Surabaya became a hot topic that was discussed by the media because of many conflicts that made the party body in Surabaya ups and downs in the 1982 elections

Based on the background of the event, the formulation of the problem in the research is as follows: 1) the internal consolidation of the Indonesian Democratic Party (PDI) Surabaya in the

1982 general election; 2) the internal consolidation process of the Indonesian Democratic Party (PDI) in elections in Surabaya in the election 1982, 3) consolidated results from PDI Surabaya in the 1982 elections

The internal consolidation of PDI Surabaya during the 1982 General Election was more preoccupied with the problem of PDI Surabaya PDC structure shift involving Soepardi with Didiek Rahadi leading to the deployment of DPC PDI Surabaya. Soetam was appointed as caretaker DPC PDI Surabaya until confercab. Konfercab which was held on 31 January resulted in Soetam as the chairman of DPC PDI, which served until the completion of the 1982 election. In the 1982 election the DPC PDI Surabaya Soetam targeted 7 seats of the Tk II DPRD Surabaya, as well as devised a nightly campaign strategy to accommodate the masses of PDI supporters and prioritized campaigns from the kelurahan (Campaign from below). The PDI campaign itself was simple and ended with a massive PDI campaign at Gelora Tambak Sari on 26 April. Results of votes PDI Surabaya in the 1982 Election 178.837, with the acquisition of 6 seats in DPRD Tk II Surabaya

Keywords: Consolidation, Elections 1982, PDI, Surabaya

PENDAHULUAN

Perubahan rezim politik yang berkuasa membawa konsekuensi menjamurnya kelahiran partai politik baru di Indonesia. Hal ini merupakan ekspresi kebebasan warga negara yang pada masa orde baru ditekan. Tekanan ini dirasakan semenjak tahun 1971 dengan kemenangan Golkar pada pemilihan umum tahun 1971. Pemerintah pada masa itu yang notabene adalah Golkar melebur sebelas partai politik peserta pemilihan umum tahun 1971 kedalam tiga golongan besar, yaitu golongan nasionalis, golongan spritual dan Golongan Karya. Pada kenyataannya kebijakan pengelompokkan partai sesuai dengan golongan-golongan yang ada di Negara ini didukung oleh partai-partai pada masa itu, sehingga partai politik yang tidak mau dilebur dalam golongan spiritual tetapi lebih memilih untuk meleburkan diri ke dalam partai nasionalis.

Partai politik adalah salah satu dari infra struktur politik, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal-mula, bentuk dan proses pemerintahan pada tingkat negara¹. Partai politik di satu sisi, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga

negara² Oleh karena itu partai politik memiliki peranan yang demikian penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya di Indonesia peranan ini semakin penting mengingat bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, adat istiadat, sehingga partai politik mutlak dibutuhkan perannya untuk menjamin tiap-tiap warga negara menyampaikan kehendak dan aspirasinya. Partai-partai politik sekaligus mencerminkan ragam ideologi utama yang berkembang, yakni Islam, Kristen, Nasionalis, Sosialis, dan Komunis yang hingga kini bertahan sebagai "aliran-aliran politik"³.

Partai politik merupakan komponen yang penting dalam sistem politik demokrasi, dengan demikian penataan kepartaian harus mampu bertumpu pada kedaulatan rakyat, yaitu memberi kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. Demikian pentingnya keberadaan partai politik sehingga partai politik sering disebut sebagai salah satu atribut negara demokrasi modern. Hak warga negara untuk memilih pemerintahannya melalui pemilihan umum yang periodik yang bebas dan adil diakui sebagai hak demokrasi yang paling mendasar. Pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa Indonesia tidak pernah dibangun

²Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 153.

³R. William Riddle, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 133.

¹Inu Kencana Syafie, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT. Retika Aditama, 2002), hlm. 77.

di atas satu fondasi atau kaki ideologi yang tunggal⁴. Perlindungan terhadap hak ini merupakan pengakuan atas hak untuk memilih dan kebutuhan akan suatu sistem yang pemilihan umum yang inklusif. Hak ini hanya akan berarti bila ada jaminan bahwa pemilihan umum berjalan transparan dan para pemilih harus dapat memilih di antara partai-partai politik yang mampu menawarkan kepada rakyat pilihan-pilihan program kerja yang akan dilaksanakannya.

PDI yang salah satu nantinya menjadi PDI Perjuangan dapat diibaratkan sebagai “anak haram” yang kelahirannya tidak dikehendaki tapi tak terhindarkan. Keharusan bagi Orde Baru untuk membangun citra diri sebagai rezim demokratis mengharuskannya untuk menerima kehadirannya. PDI merupakan fusi dari 5 parpol yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba dan IPKI⁵ Agar dapat berjalan dengan efektif, demokrasi tidak membutuhkan pemimpin partai yang otoriter, melainkan partai demokratis yang beranggotakan massa. Di satu sisi, partai merupakan organisasi besar yang menggunakan sistem sentralisasi terbatas dan terdapat di seluruh wilayah negara. Demikian halnya dengan kepemimpinan DPC-PDI Kotamadya Surabaya hasil fusi, ketua umum. Bambang Soepratiko pada tahun 1975 di gulingkan oleh kelompok D.Rahadi yang pada saat itu didukung oleh ketua DPD-PDI Tingkat I Jawa Timur dan di gantikan oleh Soenaryo sebagai ketua umum dan D. Rahadi sebagai Wakil Ketua. Dengan adanya hal tersebut maka suatu organisasi dalam hal ini partai politik secara ideal untuk memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi. bagi pendapat yang bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dan damai.

PDI sebagai organisasi politik, harus dapat berkembang dan tampil dalam percaturan politik di negara Indonesia serta memperoleh kepercayaan rakyat karena programnya sesuai dengan program pembangunan⁶ Sistem politik

pada hakekatnya melaksanakan fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan merubah unsur pertautan hubungan agama dan sistem ekonom, melindungi kesatuan sistem politik dan ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkannya terhadap masyarakat lain dan menyerangnya. Secara periodik pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilihan umum 6 kali yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Organisasi penyelenggara pemilihan umum pada masa Orde Baru adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung personil-personil dalam lembaga negara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut (1) mengapa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) cabang Surabaya melakukan konsolidasi internal dalam Pemilu 1982, (2) bagaimana proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam pemilihan umum dalam cabang Surabaya yang terjadi tahun 1982, (3) bagaimana hasil konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam pemilihan umum di Surabaya pada tahun 1982.

Berdasarkan berbagai kajian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui latar belakang konsolidasi internal PDI cabang Surabaya selama pemilu 1982, (2) untuk mendeskripsikan proses konsolidasi internal PDI cabang Surabaya selama pemilu 1982, (3) untuk menganalisa hasil konsolidasi internal PDI cabang selama pemilu 1982.

METODE

Penelitian tentang restrukturisasi perbankan Nasional masa reformasi menggunakan metode sejarah. Metode sejarah mempunyai empat langkah proses penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Pada tahap

⁴Deliar Noer, *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), hlm. 75

⁵Ipong S. Azhar, *Benarkah DPR Mandul Pemilu, Parpol, dan DPR Masa Orde Baru*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1997), hlm. 90

⁶Surabaya Post, *Kongres PDI I*, tanggal 1 September 1976, hlm. 2.

heuristik atau penelusuran sumber, peneliti memperoleh sumber sekunder berupa sumber dokumen berupa arsip tentang situasi internal Partai Demokrasi Indonesia Kotamadya Surabaya dengan nomor Arsip 211/1148/411.86/86 dan pengesahan berdirinya PDI dan susunan DPC PDI Kota Surabaya, disertai juga dengan beberapa foto kampanye PDI pada Pemilu 1982, berita mengenai kondisi internal, persiapan dan kampanye Partai Demokrasi Indonesia cabang Surabaya selama pemilu 1982, serta proses Penyelenggaraan Pemilu 1982 di Kota Surabaya.

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan sumber data yang jelas maka dilakukan verifikasi atau kritik sumber, meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Verifikasi dilakukan dengan mengelompokkan sumber yang sudah ditemukan dan terkait dengan pokok pembahasan penelitian. Setelah dilakukan pengelompokan, sumber yang diperiksa dan diuji, penyeleksian data dimaksudkan untuk menentukan kelayakan dan relevansi sesuai dengan pokok pembahasan. Dalam penulisan ini pengujian dilakukan dengan cara pemilihan berita dan tahun yang sesuai dengan penulisan, usaha ini dilakukan untuk menghindari data yang menyimpang dan tidak sesuai dengan tema, tahap ini penulis mencoba membandingkan antara berita yang didapat dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan untuk mendapatkan suatu fakta mengenai kondisi internal PDI selama Pemilu 1982. Dari laporan khusus kantor sosial politik kota Surabaya data yang didapat bahwa sejak Fusi terjadi, kondisi internal PDI selama penuh dengan dinamika konsolidasi internal yang membuat seringnya terjadi konflik internal partai. Hal ini ditegaskan oleh berita yang diterbitkan oleh surat kabar Surabaya Post dan beberapa wawancara dengan narasumber. Data yang didapat selanjutnya adalah mengenai konsolidasi internal dalam menghadapi kampanye Pemilu 1982, data yang didapat adalah beberapa penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Tk II PDI, serta strategi kampanye PDI Surabaya dalam pemilu 1982, dan proses kampanye PDI Surabaya dalam pemilu 1982.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, dari tahap ini menghubungkan keterkaitan fakta dengan surat kabar, majalah, sumber pustaka, arsip dan wawancara. Interpretasi yang dihadirkan dalam penulisan melalui hasil

proses pemikiran penulis dengan tetap berkomitmen pada nilai-nilai objektif guna menekan unsur-unsur subjektivitas dari penulis yang disajikan⁷. Dalam tahapan interpretasi penulis mencoba menganalisa beberapa sumber yang sezaman. Sumber sezaman yang dianalisa adalah mengenai laporan khusus kantor sosial politik mengenai kondisi internal Partai Demokrasi Indonesia 1984 mengenai kondisi internal PDI. Dari laporan tersebut fakta yang didapat adalah kondisi internal Partai Demokrasi Indonesia ditingkatkan nasional maupun ditingkatkan Surabaya terjadi konflik internal.

Fakta selanjutnya mengenai konflik partai ini adalah bagaimana konflik Partai Demokrasi Indonesia ini diselesaikan secara internal partai dilakukan dengan menggunakan mekanisme Partai Demokrasi Indonesia berupa penyelenggaraan konferensi cabang kota Surabaya termuat juga dari berita yang didapat dari berita Surabaya post bulan Januari. Fakta mengenai kampanye dan strategi PDI Surabaya didapatkan dari berita surat kabar Surabaya Post serta beberapa Wawancara dengan narasumber.

Setelah melalui beberapa tahap, akhir dari penyelesaiannya yaitu melakukan penulisan. Setelah data disusun dan ditata kemudian tahap selanjutnya melakukan penulisan sesuai dengan kerangka penulisan, dengan runtutan penulisan sehingga dengan mudah dapat dipahami. Penulisan ini menggunakan model penulisan diskriptif analitis dengan menyajikan secara jelas, sejarah munculnya Partai Demokrasi Indonesia, serta situasi pemilu Partai Demokrasi Indonesia tahun 1982 di Surabaya.

Tahap yang terakhir yaitu *historiografi*. Pada tahap ini setelah berhasil menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan tema penulis menulis fakta-fakta tersebut sebagai hasil penelitian sejarah tentang “*Konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Cabang Surabaya Dalam Pemilu Tahun 1982*”

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSOLIDASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA CABANG SURABAYA DALAM PEMILU TAHUN 1982

⁷*Ibid*, hlm. 5.

1. Latar Belakang Konsolidasi PDI Surabaya dalam Pemilu Tahun 1982

Perjalanan konsolidasi internal PDI dimulai sejak berakhirnya Kongres I (1976) hingga memasuki era-era kritis menjelang Kongres II (1981). Perjalanan ini dianggap sebagai tujuan fusi tuntas paripurna dan harmoni internal bisa dicapai. Tetapi kesaksian sejarah perjalanan PDI sepanjang tahun-tahun di era ini bercerita tentang kisah sebaliknya⁸.

Ketua Umum DPD Jatim Drs. Marsoesi dalam pidatonya pada Musyawarah PDI se-Jatim menyerukan kepada warganya untuk ikut serta menciptakan suasana favourable menjelang dilangsungkannya kongres pertama PDI di Jakarta. Dengan tujuan untuk dapat dan mampu memiliki visi politik yang jauh untuk mengatasi kerikil-kerikil tajam yang menghambat perkembangan PDI⁹.

Pada masa orde baru terdapat kebijakan penyederhanaan partai politik karena partai politik dianggap sebagai sumber pertikaian yang mengganggu stabilitas. Partai-partai politik mendapatkan berbagai tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Orde Baru. Kebijakan penyederhanaan dilanjutkan dengan kebijakan fusi partai politik.

Kongres pertama PDI membahas masalah yang menyangkut program partai, masalah-masalah pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Kongres itu juga mengesahkan tanda gambar PDI yang kini tengah dipilih oleh suatu panitia. Dengan demikian kongres pertama PDI yang dihadiri 252 utusan dari 261 cabang PDI di seluruh Indonesia itu, selain telah berhasil mengukuhkan piagam perjuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta mengesahkan aparat partai sesuai dengan Pasal 28 ayat 3 Anggaran Dasar PDI, telah pula berhasil menggariskan program-program perjuangan partai dalam bidang politik, ekonomi-pembangunan dan sosial-budaya, termasuk pemilu yang dihadapi tahun 1977¹⁰. Membentuk suatu organisasi merupakan ekspresi keyakinan dan pikiran yang menemukan persamaan di antara warga masyarakat, sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyatakan pendapat. Dalam menghadapi Pemilu 1977, kongres telah

menyetujui tanda gambar PDI berupa perisai Pancasila seperti yang terdapat dalam gambar Garuda Pancasila, lambang negara kita.

Persoalan internal PDI sendiri dimulai sejak adanya kericuhan internal PDI Jawa Timur dalam menyambut Kongres PDI II, yang dianggap sebagai periode krisis internal PDI. PDI Jatim dalam rapatnya pada tanggal 24 Juli 1976 yang diadakan untuk membahas surat DPP-PDI tanggal 21 Juli 1976 yang isinya menghentikan kegiatan DPD PDI Jawa Timur, telah mengambil keputusan:

1. Tidak membenarkan dan menolak tindakan DPP PDI tersebut yang dituangkan di dalam suratnya tanggal 21 Juli 1976 No.173-IN-D-DPP-VII-1976.
2. DPD PDI Jatim berketetapan hati untuk berjalan terus menyelesaikan tugas-tugas PDI dalam rangka mensukseskan Pemilu 1977 dan pelaksanaan UU No.3-1975.
3. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah DPD PDI Jatim adalah melalui konferensi Daerah.

Keputusan DPD Jatim itu dikirimkan kepada DPP PDI, dengan ditandatangani oleh 8 anggota. Ketua DPP PDI Usep Ranuwidjaja atas pertanyaan "Buana" membenarkan bahwa segala kegiatan DPD PDI Jatim untuk sementara dihentikan. Penghentian itu karena ada surat "ketidakpercayaan" dari para anggotanya terhadap Ketua DPD PDI Jatim Drs. Marsoesi. Di harapkan persoalan ini sudah dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sikap yang diambil oleh DPP PDI adalah untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka konsolidasi dalam tubuh PDI.

Gubernur Jawa Timur Soenandar Prijosoedarmo mengharapkan, kericuhan di kalangan kepengurusan PDI Jatim diatasi secara proporsional, sehingga organisasi mampu memenuhi ketentuan Pemerintah yaitu memiliki kemantapan melakukan konsolidasi¹¹. PDI sebagai organisasi politik harus dapat berkembang dan tampil dalam percaturan politik di negara Indonesia serta memperoleh kepercayaan rakyat karena programnya sesuai dengan program pembangunan. Satu-satunya alternatif, wujudkan konsolidasi dan kemudian

⁸ Cornelis Lay, *op cit.*, hlm. 131

⁹ Surabaya Post, *PDI siap Menyambut Pemilu*, 2 April 1976, hlm. 2.

¹⁰ Surabaya Post, *Polemik PDI*, 14 April 1976, hlm. 1.

¹¹ Surabaya Post "hasil Konferda PDI Jatim", tanggal 1 September 1976, hlm. 2.

mengejar kekurangan-kekurangan dalam memberikan partisipasinya pada pembangunan. Setelah berlangsung selama dua hari, Konferda PDI Jatim berhasil menyempurnakan serta mengukuhkan kepengurusan DPD PDI Jatim ssesat sebelum ditutup tanggal 29 September¹². Pelaksanaan penyempurnaan susunan ini dilakukan oleh Formatur-formatur yang terdiri dari Ketua Umum dan semua ketua-ketua. Konperda PDI Jatim juga menetapkan keputusan lain yaitu; ikrar kebulatan tekad dan diputuskan pula mengenai rumusan-rumusan keputusan Konferensi diberikan mandah penuh kepada Ketua Umum beserta semua ketuanya. Di internal PDI Surabaya sendiri pada waktu sebelum Pemilu 1977 terjadi pergolakan internal kepengurusan. Didiek Rahadi selaku Wakil Ketua DPC PDI Kotamadya Surabaya dan Anggota DPRD II Kotamadya Surabaya membuat persoalan baru untuk menggulingkan Ketua Umum Soenaryo dengan membentuk DPC PDI tandingan. Dengan dukungan Ketua DPD PDI Jawa Timur, maka berdasarkan Surat Keputusan DPD PDI Tingkat I Jawa Timur Nomor: 05.A/DPD-PDI/A/1977, tanggal 9 Juli 1977, Drs. Soenaryo (Ketua Umum DPC PDI Kotamadya Surabaya) diganti oleh Bambang Soepratikno¹³.

Setelah berakhirnya Kongres II PDI yang menghasilkan Soenawar sebagai Ketua Umum PDI. Di Surabaya sendiri pada tahun 1981 mengadakan Konferensi Cabang Surabaya yang terselenggara pada 11 Oktober 1981 diselenggarakan Muscab PDI Kotamadya Surabaya bertempat di kompleks Balai Pemuda, Jl. Pemuda No.15 Surabaya, serta berhasil dipilih sebagai Ketua Umum DPC PDI Kotamadya Surabaya, yaitu Soepardi Sariohartono. Pada periode ini Didiek Rahadi yang pada waktu kepengurusan Soenaryo mencoba merebut Ketua PDI Cabang Surabaya tergeser dari kepengurusan PDI Surabaya. Hubungan Didiek Rahadi Sendiri mulai renggang dengan Ketua PDI Surabaya¹⁴.

PDI Surabaya terbagi ke dalam dua kubu. Antara kubu Soepardi serta kubu Didiek Rahadi. Maneuver politik dilakukan oleh

Didiek Rahadi yang bertujuan untuk menggoyang dan merongrong tampuk kepemimpinan Soepardi.

2. Proses Konsolidasi PDI Surabaya Selama Pemilu 1982

Soetam Soekarno baru bersedia menerima jabatan ketua caretaker DPC PDI setelah mendengar langsung pernyataan dari DPP PDI. Walikotaamadya Surabaya Moehadji Widjaja merestui kepemimpinan Soetam Soekarno dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Ketua DPD PDI Jatim Marsoesi, mantan Ketua DPC PDI Soepardi, dan Kepala Kantor Sospol Moch. Iskak¹⁵.

Tugas pertama yang diemban oleh Soetam Soekarno setelah diangkat oleh DPP menjadi caretaker PDI Surabaya adalah mengkonsolidasikan dan membuat konfrensi cabang Surabaya sebelum diselenggarakannya Pemilu 1982. Proses konsolidasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan beberap rapat antar komisariat kecamatan di wilayah Surabaya. Rapat pertama dilakukan di kantor komisariat PDI Semampir Surabaya yang mengumpulkan komisariat kecamatan PDI wilayah Surabaya Utara. Rapat kedua dilakukan di kantor Komisariat PDI Rungkut Surabaya yang mengumpulkan komisariat kecamatan PDI wilayah Surabaya Timur. Rapat ketiga dilakukan di kantor komisariat Karangpilang yang mengumpulkan komisariat kecamatan PDI Surabaya wilayah Selatan. Rapat keempat dilakukan di kantor komisariat Tandes yang mengumpulkan komisariat kecamatan PDI wilayah Surabaya Barat. Dari keempat rapat tersebut dihasilkan kesepakatan untuk mengadakan konferensi cabang Surabaya pada Bulan Januari 1982.

Selain merencanakan Konfercab dalam pernyataannya Soetam Soekarno “konfrensi tidak akan terjadi bila masih ada friksi dan perpecahan dalam partai baik pimpinan maupun basis, namun persoalan tersebut tidak akan mungkin seratus persen selesai, bagaimanapun kecilnya kemelut pasti ada, dan tentunya pasti akan membuang waktu percuma bila harus menunggu sampai benar-benar tuntas”¹⁶.

¹²Surabaya Post “polemic internal PDI Surabaya, tanggal 2 September 1976, hlm. 2.

¹³ Arsip Nomor 211/1148/411.81/86, Situasi Intern Partai Demokrasi Indonesia Kotamadya Surabaya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, hlm. 4.

¹⁴ Arsip, *op cit.*, hlm. 4.

¹⁵ Surabaya Post, *Serah Terima Jabatan Sementara Pengurus DPC PDI Surabaya*, tanggal 19 November 1981, hlm. 2.

¹⁶ Surabaya Post, *Daftar Calon Tetap PDI KMS*, tanggal 13 Januari 1982, hlm 2

Proses konsolidasi internal selanjutnya mengadakan perbaikan komisariat ditingkat kecamatan dan kelurahan PDI Surabaya. mengadakan pembentukan komisariat PDI ditingkat kelurahan Surabaya yang belum terbentuk. Perbaikan dan pembentukan Komisariat dianggap penting karena peranan komisaris dalam konferensi cabang PDI nanti sangat lah menentukan untuk memilih siapa yang akan memimpin DPC PDI Surabaya, serta menyusun tim formatur kepengurusan DPC PDI Surabaya selanjutnya.

Sebelum Konferensi juga diadakan pertemuan antara DPC caretaker dengan anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI dan bekas pengurus PDI pimpinan Soepardi yang bertujuan untuk memperat perasatuan dan mendamaikan friksi dalam kelompok. DPC caretaker ini juga mengirimkan utusan kepada pusat untuk melaporkan hasil kerja dari DPC PDI Surabaya., utusan yang dikirim adalah Sudjono dan Sunadji¹⁷.

Pernyataan Marsoesi selaku Ketua DPD PDI Jawa Timur bertolak belakang dengan apa yang telah distatemenkan dan dikerjakan oleh Soetam selaku caretaker DPC PDI Surabaya. Menurut Marsoesi, keadaan PDI di Surabaya praktis mandek. Ini dikarenakan adanya perubahan drastis dengan terjadinya pengalihan pengurus DPC kepada caretaker dua bulan lalu, pendidikan massa hanya dilakukan secara diam-diam. Tetapi Marsoesi juga membantah bahwa kerja caretaker PDI Surabaya diluar pengetahuan DPD PDI Jawa Timur. Pada prosesnya internal PDI Surabaya dikoordinasikan oleh caretaker PDI Surabaya dibawah pimpinan Soetam menyepakati bahwa Konferensi Cabang PDI Surabaya terselenggara pada 31 Januari 1982.

Persoalan daftar Calon Sementara inilah yang menjadi salah stau polemik antara Soepardi dan Didiek Rahadi yang membuat Soepardi dicopot dari Ketua Cabang PDI Surabaya pada bulan Oktober 1981. Kerja untuk mengurus Daftar Calon Sementara ini diteruskan oleh caretaker PDI di bawah pimpinan Soetam Soekarno. Rekomendasi hasil kerja konsolidasi Soetam sendiri lalu diajukan kepada DPP PDI.

Dari data PPD Kota Surabaya tercatat 21 surat tanggapan mengenai Daftar Calon Sementara, dengan rincian 12 surat mengenai calon sementara dari PPP, 5 Golkar dan 4 PDI

yang akan diserahkan kepada ketiga kontestan¹⁸. Dari hal itu terlihat bahwa persoalan mengenai calon sementara PDI tidaklah mendapat banyak tanggapan dari masyarakat.

Sedangkan daftar calon tetap harus tersusun pada tanggal 9 Februari 1982. Mengenai surat tanggapan pada akhir penutupan menjadi 25 surat. Dari surat yang masuk, 96 persen mengenai masalah mental, moral, serta organisasi internal, sehingga masing-masing kontestan harus menanggapi surat tersebut. Hanya satu surat mengenai masalah politik dan diserahkan kepada Pulaksusda 084 Surabaya. Surat tanggapan tersebut belum dapat dijadikan sebagai bagian untuk merubah nomer urut atau pencoretan dari daftar.

Setelah terbentuknya DPC PDI Surabaya persoalan konsolidasi internal diarahkan kepada persiapan kampanye dan teknis mengenai Pemilu 1982.

3. Target PDI Surabaya Dalam Pemilu 1982

Konsolidasi DPC PDI Surabaya haruslah memiliki tujuan prestasi untuk dicapai pada pemilu 1982 di Kota Surabaya. Sesuai dengan manifesto politik yang menjadi hasil dari Kongres II PDI pada bulan Februari 1981 di Jakarta. Manifesto politik tersebut sering Manifestasi Pemilu 1982 yang berupa kesepakatan bersama dari Kongres. Isi manifestasi politik adalah :

1. Melestarikan Pancasila dan UUD 1945
2. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan disegala bidang,
3. Jangan merusak kerukunan yang sudah tercipta sampai ketingkat unti keluarga masyarakat,
4. Tetap mencalonkan Soeharto sebagai Presiden RI dalam Sidang Umum MPR.

Dalam Manifestasi itu tecantum mekanisme demokrasi pancasila dan kelancaran pembangunan nasional. Dalam mekanisme demokrasi pancasila, disebutkan PDI siap dan bertekad untuk menyukseskan pemilu 1982 dalam artian yang luas, yaitu dengan pemilu ini harus menghasilkan kepemimpinan nasional tetap di tangan Orde Baru yang akan

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Surabaya Post, 21 tanggapan masuk PPD Kotamadya Surabaya, tanggal 18 Januari 1982, hlm 2.

menjalankan UUD' 45 secara murni dan konsekuen¹⁹.

Disamping itu DPP PDI juga menyerukan seluruh kader dan basis massanya untuk menjalin keakraban dan kesolidaritasan nasional dalam pemilu 1982. Di bidang pembangunan nasional dalam isu yang diangkat oleh PDI adalah: Pertama, petani harus dilindungi, daya beli petani harus ditingkatkan untuk itu impor beras setahap demi setahap harus dihapus, peningkatan produksi pertanian, menolak ditiadakannya subsidi pangan; kedua, industri besar tidak boleh mematikan industri-industri kecil, bantuan untuk pengusaha kecil nasional, seluruh kekayaan harus tetap di tangan negara, pemberlakuan sistem kontrak karya dapat diberlakukan di sumber ekonomi yang lainnya; ketiga, pembinaan generasi muda ditempatkan sebagai subyek pembangunan bukan menjadikan generasi muda sebagai robot atau obyek, perencanaan pembinaan generasi muda harus direncanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, sehingga generasi muda tidak hanya sebagai penakawan²⁰.

Dalam target pemilu 1982 PDI secara nasional hanya menargetkan peningkatan suara, serta penambahan perolehan kursi DPR. Marsoesi selaku ketua DPD PDI Jawa Timur menargetkan PDI mendapat 11 kursi DPRD tk I pada pemilu 1982. Sedangkan Soetaman sendiri menargetkan penambahan kursi sejumlah tiga kursi untuk DPRD tk II Kota Surabaya pada pemilu 1982. Target kursi tersebut dirasa menurut internal PDI sangat realistis dicapai karena PDI sendiri merupakan partai kontestan *underdog* dalam pemilu 1982²¹.

B. HASIL KONSOLIDASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) DI SURABAYA PADA PEMILU TAHUN 1982

1. Persatuan Faksi dalam Pengurus PDI Surabaya

Proses konsolidasi awal PDI dimulai dengan penetapan Daftar Calon Sementara legislatif tingkat II Kota Surabaya. Pendaftaran

Calon Sementara inilah yang menjadi polemik antara Drs. Soepardi dan Didiek Rahadi yang membuat Drs. Soepardi dicopot dari Ketua Cabang PDI Surabaya pada bulan Oktober 1981. Kerja untuk mengurus Daftar Calon Sementara ini diteruskan oleh caretaker PDI di bawah pimpinan Soetam Soekarno. Setelah itu Daftar Calon Sementara memang sengaja diajukan ke DPP, sebab di daerah atau cabang terjadi kemelut atau permasalahan, sehingga penyusunan dilakukan DPP. DPP PDI-lah yang menentukan Daftar Calon Sementara untuk DPRD tk II Kota Surabaya dari Fraksi-PDI.

Dari data PPD Kota Surabaya tercatat 21 surat tanggapan mengenai Daftar Calon Sementara, dengan rincian 12 surat mengenai calon sementara dari PPP, 5 Golkar dan 4 PDI yang akan diserahkan kepada ketiga kontestan²². Dari hal itu terlihat bahwa persoalan mengenai calon sementara PDI tidaklah mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Sedangkan daftar calon tetap harus tersusun pada tanggal 9 Februari 1982.

Mengenai surat tanggapan pada akhir penutupan menjadi 25 surat. Dari surat yang masuk, 96 persen mengenai masalah mental, moral, serta organisasi internal, sehingga masing-masing kontestan harus menanggapi surat tersebut. Hanya satu surat mengenai masalah politik dan diserahkan kepada Pulaksusda 084 Surabaya. Surat tanggapan tersebut belum dapat dijadikan sebagai bagian untuk merubah nomer urut atau pencoretan dari daftar.

Hanya lima nama yang dinyatakan tidak lolos dalam daftar calon tetap karena mengundurkan diri serta tidak melengkapi persyaratan administrasi. Lima nama tersebut terdapat satu di Golkar dengan nomor urut 47, empat di PDI dengan nomor urut 17, 34, 41, dan 49²³. PDI Surabaya sendiri pada waktu penandatanganan berkas daftar calon tetap dilakukan oleh Ketua PDI Surabaya, Soetam Soekarno serta didampingi Soepardi. Dalam Daftar Calon Tetap PDI sendiri tidak mengalami perubahan sesuai dengan perkiraan.

Reaksi mengenai penetapan daftar calon sementara diutarakan oleh Didiek Rahadi. Didiek Rahadi yang merupakan lawan Soepardi dalam internal PDI dengan menyosal

¹⁹ Surabaya Post, *PDI Mengeluarkan Manifesto dalam Pemilu 1982*, tanggal 9 Maret 1982, hlm 1.

²⁰ *Ibid*

²¹ Hasil wawancara dengan bapak amanu (Mantan fungsionaris PDI 1976-1990), 4 Juli 2017

²² Surabaya Post, tanggal 18 Januari 1982, hlm 2.

²³ Surabaya Post, 9 Februari 1982, hlm 2

mengatakan bahwa “sebenarnya pengurus DPC yang baru, menunggu susunan daftar calon tetap yang dibuat oleh DPP PDI, tapi aneh sampai hari ini belum juga datang dari Jakarta.²⁴ Didiek Rahadi juga membenarkan bahwa DPP akan menyusun kembali daftar calon tetap tetapi mengalami hambatan karena ada ketentuan tidak boleh merubah daftar calon sementara tidak boleh drastic, Sehingga melapangkan jalan Soepardi menjadi calon nomer 1 PDI untuk memperoleh kursi di DPRD Surabaya. Didiek Rahadi pun merelakan hal tersebut.

Setelah penetapan daftar calon sementara ada beberapa anggota lama DPRD Surabaya yang kehilangan peluang untuk mendapatkan kursinya kembali. Hal ini dikarenakan ada 4 surat tanggapan yang dialamatkan kepada PDI untuk menjegal mereka. Beberapa anggota lama PDI yang pernah menjadi anggota DPRD Surabaya periode (1977-1982) terancam tidak dapat menjadi anggota DPRD Surabaya kembali. Dewan lama yang mendapatkannomor urut 30 Soegiantoro, nomor urut 35 Latief Asmarayudha, dan nomor urut 36 Didiek Rahadi tidak mungkin lagi dapat menjadi anggota DPRD periode (1982-1987). Hal ini terlihat jelas kenapa Rahadi menggeser posisi Drs. Soepardi pada tahun 1981, karena persoalan penentuan nomor urut daftar calon sementara PDI untuk Pemilu 1982.

Dalam peringatan HUT PDI ke-9 jatuh pada 31 Februari 1982 di Gelanggang Remaja Tambaksari menjadi ajang konsolidasi akbar sebelum menghadapi pemilu 1982. Dengan massa selalu meneriakkan “Hidup PDI” diiringi dengan masuknya pemimpin partai. Dalam sambutannya Ketua DPD PDI Jatim Drs. Marsoesi mengungkapkan suasana itu sebagai pencerminan semangat massa yang mengelola sekaligus patriotisme, heroisme dan nasionalisme masih menjwai banyak sekali angkatan muda bangsa ini.

Dalam pernyataannya setelah acara HUT PDI ke-9 Ketua PDI Surabaya mengatakan bahwa acara tersebut adalah bukti nyata kekompakan dan keutuhan organisasi dan pengurus di dalam tubuh PDI Surabaya. “Tanpa pidato sekalipun keadaan ini sudah cukup bicara panjang bagaimana persatuan PDI sudah mulai tumbuh dan berakar²⁵. Mantan ketua yang terlengserkan Drs. Soepardi pun

berkomentar dengan bangga bahwa bila PDI dapat mempertahankan jumlah suara yang berhasil diraih pada Pemilu 1977 yang mendapatkan 5 kursi. Penambahan suara pun sempat dilontarkan oleh Drs Soepardi.

Di arena HUT ke-9 PDI ini pun terlihat masalah internal PDI sudah selesai dengan kompaknya trio PDI Surabaya Soetam, Soepardi, dan Didiek Rahadi. Di samping itu acara tersebut menjadi penegasan bahwa PDI masih setia dengan perjuangan pembangunan rezim Orde Baru.

2. Pergantian Ketua DPC PDI Surabaya

Tugas yang diemban oleh Soetam Soekarno setelah diangkat oleh DPP menjadi caretaker PDI Surabaya adalah mengkonsolidasikan dan membuat konfrensi cabang Surabaya sebelum diselenggarakannya Pemilu 1982. Soetam Soekarno selaku ketua caretaker berhasil membuat kesepakatan dengan segenap pimpinan partai ditingkat kecamatan mengenai pelaksanaan Konfercab yang akan diselenggarakan pada 31 Januari 1982, dan berencana ditempatkan di balai kota.

Selain merencanakan Konfercab dalam pernyataannya Soetam Soekarno “konfrensi tidak akan terjadi bila masih ada friksi dan perpecahan dalam partai baik pimpinan maupun basis, namun persoalan tersebut tidak akan mungkin seratus persen selesai, bagaimanapun kecilnya kemelut pasti ada, dan tentunya pasti akan membuang waktu percuma bila harus menunggu sampai benar-benar tuntas”²⁶.

Konferensi berlangsung 31 Januari mulai pukul 08.30 di Gedung Pertemuan Lazaris Jl. Dr. Soetomo. Hadir tim DPP PDI dari Jakarta yang terdiri dari Yusuf Merukh (Ketua Tim), Mustafa Supangat, Samosir, John Pakan, dan Tahamata. PDI Jatim dipimpin Marsoesi, dan dari Surabaya semua pengurus caretaker dan para komisaris PDI, serta akan ada pengarahan dari ketua umum DPP PDI Prof Soenawar Soekawati²⁷.

Pelaksanaan Konfercab dalam pembentukan pengurus cabang ternyata berlangsung alot dan nyaris menemui jalan buntu, padahal 33 pembicara dari 16 komasariat kecamatan pengurus PDI memiliki

²⁶ Surabaya Post, tanggal 13 Januari 1982, hlm

2

²⁷ Surabaya Post, tanggal 29 Januari 1982, hlm.

2.

²⁴ Ibid

²⁵ Surabaya Post, 1 Maret 1982, hlm 2

pendapat yang sama. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada ketua tim Drs Yusuf Marukh, Kepengurusan yang baru PDI terbentuk pada pukul 9 malam. Hasil rapat tim formatur mengumumkan 36 nama yang duduk menjadi Dewan pertimbangan cabang, Departemen, dan DPC, hasilnya tidak ada satu pun yang setuju. Empat komisariat berbicara mengenai sikap mereka kepada pengurus yang baru: pertama, mengenai pimpinan DPC adalah warga PDI Surabaya sendiri dengan kriteria dari generasi muda yang memiliki basis massa yang kuat. Tapi ketua Formatur Yusuf Merukh tetap pada keputusan semula dan berjanji akan melakukan pergantian Pengurus DPC sesuai dengan tuntutan setelah Pemilu dengan mengadakan Konfercab lagi.

Persoalan tidak hanya berhenti disitu, tadinya Didiek Rahadi yang tecantum sebagai ketua departemen organisasi mendadak menghilang. Sehingga mengundang reaksi keras dari komisariat pro-Didiek Rahadi. Hal ini terselesaikan karena terjadi lobbying antara komisariat dengan Ketua DPD PDI Jawa Timur sehingga tercapai kesepakatan mengenai posisi Didiek Rahadi dijadikan sebagai wakil ketua. Sedangkan mantan Ketua Drs. Soepardi dijadikan anggota Dewan Pertimbangan Cabang bersama Bambang Pratikno, Mz. Hasan, R.M Sutiksan²⁸. Drs Soepardi pada saat sebelum pernah berkomentar bahwa dia tidak diundang dalam Konfercab 31 Januari. Tapi hal ini disanggah oleh pimpinan caretaker dengan mengatakan bahwa undangan untuk Soepardi datangnya terlambat. Hal itu dilakukan untuj menaikan bargaining power Soepardi

Dalam pandangan Mentik kesepakatan tersebut sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai dalam Konfercab DPC PDI Surabaya yang terselenggara dikarenakan munculnya aspirasi generasi muda PDI²⁹. Yusuf Merukh menegaskan bahwa DPC yang baru terbentuk hanyalah memiliki masa tugas setelah Pemilu 1982. Seandainya penting dapat diadakan konfrensi cabang lagi bila diperlukan.

3. Kampanye dan Peningkatan Hasil Pemilu 1982 PDI Surabaya

Kampanye Pemilu tahun 1982 diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan dan atau anggota Organisasi atas nama Dewan

Pimpinan, dan kegiatannya hanya dilaksanakan selama jangka waktu kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah (45 hari).Demikian disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang “Tata cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Masa Tenang”, yang berkalu mulai tanggal 5 Januari 1982. Ketentuan mengenai kampanye Pemilu harus ditaati oleh organisasi serta dilaksanakan dengan seksama, tertib, kesatria, jujur dan bertanggung jawab³⁰.

Menteri Dalam Negeri Amir machmud, selaku ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), menandakan anjuran untuk tidak memilih dalam Pemilu mendatang atau untuk ikut Golput (Golongan Putih) merupakan anjuran yang merusak serta menghambat pembangunan politik rakyat. “Anjuran itu juga merupakan tindak pidana yang menyesatkan rakyat,” kata Mendageri dalam sambutannya pada upacara penandatanganan daftar calon tetap anggota DPR-RI hasil Pemilu 1982 di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut juga mengemukakan, kampanye Pemilu 1982 akan berlangsung selama 45 hari mulai 15 Maret 1982 pukul 00.00 dan berakhir tanggal 28 April 1982 pukul 24.00. Sedangkan masa tenang mulai 29 April 1982 pukul 00.00 sampai dengan 3 Mei 1982 pukul 24.00 kata Mendagri Amirmachmud³¹.

Demikian disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang “Tata cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Masa Tenang”, yang berkalu mulai tanggal 5 Januari 1982. Ketentuan mengenai kampanye Pemilu harus ditaati oleh organisasi serta dilaksanakan dengan seksama, tertib, kesatria, jujur dan bertanggung jawab³².

Wakil Presiden Adam Malik menegaskan kembali bahwa kampanye Pemilu tidak boleh memecah persatuan, melainkan harus menjadi sumber kekuatan persatuan nasional. Menurut Wapres, boleh saja mengemukakan atau menonjolkan masalah agama dalam kampanye, ataupun mengetengahkan ayat-ayat, asal untuk persatuan dan pembangunan.

³⁰ Surabaya Post, tanggal 18 Januari 1982, hlm

1

³¹ Surabaya Post, tanggal 10 Februari 1982, hlm

1.

³² Surabaya Post, tanggal 18 Januari 1982, hlm 1

²⁸ Ibid

²⁹ Hasil wawancara dengan Mentik pada tanggal 5 Juli 2017

Sebaliknya kalau untuk memecah belah, untuk menjelek-jelekan orang lain tentu tidak boleh, sebab yang demikian akan menimbulkan masalah ideologi, yang dapat menghancurkan republik ini³³.

Dalam pernyataannya kampanye ketua DPP PDI Prof Sunawar mengajak warga PDI untuk memulihkan kebesaran Partai dengan mencoblos gambar kepala banteng nomor 3 pada 4 Mei 1982. Pernyataan Prof Sunawar “Pemimpin bangsa itu harus tidak lupa pada rakyat kecil tempat mereka dilahirkan, apabila mereka lupa maka pemimpin yang demikian itu perlu digebuk sebab, pemimpin itu hanya pencoleng”³⁴. Sementara itu dalam kampanye PDI di Manado Ketua Prof Sunawar menegaskan PDI tidak menghendaki partai tunggal yang berakibat pemerintah akan menjalankan kebijakannya secara sepihak. Beliau juga menegaskan bahwa PDI akan berusaha dalam Pemilu 1982 dengan menyukseskan pemilu demi kesatuan bangsa serta program pembangunan politik nasional³⁵.

Hasil pemilu 1982 di Kota Surabaya mencerminkan bahwa kekuasaan Golkar masih bisa dipertahankan di Surabaya dengan kemenangan suara terbanyak dalam pemilu 1982, yaitu Golkar. 11 Kursi Golkar hasil dari Pemilu 1982 Surabaya sendiri mencerminkan masih solidnya kekuatan Orde Baru untuk menggalang kekuatan masyarakat Indonesia untuk memilih Golkar.

Kursi yang diperoleh oleh partai Golkar walaupun mengalami penurunan daripada periode sebelumnya yaitu kehilangan 2 kursi dibandingkan kursi 1977 yang mendapat 17 kursi³⁶. Kehilangan 2 kursi Golkar mengindikasikan bahwa kekuatan penggerak partai selain Golkar yaitu PPP dan PDI mulai meningkat, hal terjadi karena kerja-kerja Partai mulai berjalan rapi dan terorganisir

Kerja-kerja partai ini terlaksanakan dikarenakan suasana masyarakat sehat. Sehat dalam artian tidak ada intimidasi dari kekuatan diluar kontestan pemilu untuk mengarahkan secara terang-terangan untuk memilih salah satu partai politik yang dikehendaki oleh penguasa. Hal ini terlihat dengan kader-kader PPP dan PDI bisa menjalankan kampanye dan

tidak menutup-nutupi identitas partai politik mereka.

Dengan naiknya kursi PPP dan PDI mengindikasikan bahwa Pemilu 1982, mulai berjalan dengan demokratis. Hal ini terlihat dalam pernyataan ketua DPC PDI Surabaya Soetam mengenai kondisi kampanye Pemilu 1982 di Surabaya mengatakan bahwa “perlakuan pemerintah tidak berat sebelah antar Partai Politik peserta Pemilu 1982”³⁷.

PDI Surabaya sendiri pada pemilu 1982 yang awalnya mendapatkan 5 kursi pada perhitungan suara, lalu mendapatkan 6 kursi karena tambahan sisa suara. Setelah pengumuman hasil Marsoesi dan Hafid Pramucitro mengemukakan di hadapan Gubernur Jatim bahwa pelaksanaan pemilu 1982 berjalan dengan tertib dan lancar, dengan terbangunnya kerukunan dan persatuan masyarakat³⁸.

Evaluasi yang dilontarkan oleh Marsoesi untuk kerja konsolidasi internal partai secara keseluruhan sudah dianggap maksimal, dengan penambahan kursi anggota DPRD Tk I Jawa Timur serta DPRD Tk II Surabaya. Kekurangan menurut beliau terletak dalam masalah kurangnya keuangan untuk membiayai dana kampanye seperti Golkar dan PPP yang memilikir dana kampanye lebih besar. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah kampanye yang telah dilakukan oleh Golkar dan PPP. Ini terlihat bahwa konsolidasi internal PDI dalam membangun dana kampanye partai kurang maksimal. Tapi menurut Budi H bahwa dana kampanye PDI memang cukup kecil karena partai ini berbasis masyarakat kecil sehingga dana kampanye itu dari uang pribadi kader-kader partai dan semangat untuk menggalang suara partai yang paling penting³⁹.

Kurang maksimalnya Kampanye PDI Surabaya juga dikarenakan konflik internal yang sering berlarut. Konflik internal partai ini sering merubah komposisi kepengurusan PDI Surabaya. Hal ini mengakibatkan waktu dan tenaga para penggerak partai sendiri lebih fokus terhadap persoalan perebutan struktur kepengurusan DPC PDI Surabaya. Perebutan kepengurusan ini terlihat saat pelengseraan Soepardi sebagai ketua cabang PDI Surabaya, sehingga memaksa fokus internal partai

³³ *Surabaya Post*, tanggal 8 April 1982, hlm 1

³⁴ *Surabaya Post*, 26 Maret 1982. Hlm. 2.

³⁵ *Surabaya Post*, 28 Maret 1982. Hlm. 2.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Surabaya Post*, tanggal 18 Maret 1982, hlm 2.

³⁸ *Surabaya Post*, tanggal 18 Mei 1982, hlm 2.

³⁹ Wawancara dengan Budi Harjanto, tanggal 6 Juli 2017

selama sebelum pemilu 1982 bukan kepada kesuksesan PDI pada Pemilu 1982 tapi menjadi persoalan Struktural.

Disamping itu juga pembagian wilayah tugas-tugas kampanye juga menjadi salah satu factor terhambatnya konsolidasi internal PDI selama 1982. Menurut Budi Harjanto, para kader partai pada waktu itu sering berkampanye sesuai dengan wilayahnya masing-masing serta dari kubu siapa dia, tapi hal ini menjadi tidak wajar karena bila seseorang berkampanye diluar wilayah dan kubunya, maka kampanyenya dapat menimbulkan konflik fisik. Hal ini menandakan masih berpikir secara primitive khususnya pimpinan partai ditingkatan kecamatan dan kelurahan. Hal itu ditegaskan juga oleh Mentik dengan tambahan tingkatan pendidikan penggerak PDI kebanyakan adalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang lebih mengandalkan otot daripada otak. Hal ini lah yang menyulitkan tim kampanye DPC PDI Surabaya untuk membentuk suatu strategi kampanye yang menyeluruh untuk wilayah Surabaya.

PENUTUP

A. Simpulan

Konsolidasi Internal PDI Surabaya selam Pemilu 1982 lebih terhadap masalah pergeseran struktur DPC PDI Surabaya. Hal ini terlihat dari dicopotnya Soepardi dari kursi Ketua DPC PDI Surabaya pada bulan Oktober 1981. Konflik ini bermula dari dicopotnya Didiek Rahadi dari kepengurusan Cabang oleh Soepardi. Membuat DPC PDI Surabaya terbelah menjadi dua kubu. Soepardi dilengserkan karena persoalan Banteng Muda Indonesia serta penetapan Calon Sementara PDI Surabaya untuk pemilu 1982.

DPP PDI lalu mengangkat Soetam sebagai caretaker DPC PDI Surabaya, dikarenakan kekosongan pimpinan cabang. Tugas Soetam sendiri adalah menyelenggarakan Konfercab PDI Surabaya yang terselenggara pada 31 Januar 1982. Proses Konfercab sendiri berlangsung deadlock, sehingga membuat DPP PDI mengambil alih Konfercab dengan menunjuk Soetam sebagai ketua DPC PDI secara definitif. Kelompok yang berseteru antara Soepardi dengan Didiek Rahadi akhirnya terakomodasi dengan Soepardi

dijadikan Dewan Pembina dan Didiek Rahadi mendapatkan posisi wakil ketua.

Konsolidasi selanjutnya adalah persoalan penetapan masalah Daftar Calon Tetap PDI Surabaya pada Pemilu 1982. Penetapan Daftar Calon Tetap ini diambil alih oleh DPP sesuai dengan kesepakatan Konfercab yang membuat beberapa nama lama anggota DPRD Tk II Surabaya mendapatkan nomor uru buncit yang berakibat tidak jadinya mereka termauk Didiek Rahadi.

Startegi kampanye PDI sendiri difokuskan pada tingkatan kelurahan-kelurahan Surabaya sesuai dengan strategi kampanye nasional. Strategi kongkritnya adalah mengadakan kampanye dimalam hari dikelurahan-kelurahan Surabaya. Kampanye malam hari sendiri dipilih karene basisi utama PDI adalah kuli yang harus bekerja di siang hari.

Kampanye PDI Surabaya sendiri pada prosesnya dilaksanakan ditingkatan Kelurahan-kelurahan setiap malam hari dengan mengundang para jurkam serta dihiasi dengan hiburan music. PDI Surabaya sendiri menyelenggarakan rapat akbar dan kampanye akbar tanggal 25-26 April 1982 di Gelora Tambak Sari Surabaya. Perolehan suara PDI Surabaya sendiri 178.837 dan memperoleh 6 kursi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut Bagi peneliti sejarah yang ingin meneliti tentang sejarah Bangsa Indonesia terutama yang berkaitan dengan partai politik di Indonesia, ternyata masih banyak tema-tema penelitian tentang partai politik yang patut di tonjolkan namun belum terungkap secara mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti tema-tema tersebut, hendaknya dikaji secara mendalam. Sedangkan saran bagi Mahasiswa adalah dalam negara yang demokratis, kebijakan mengenai partai politik seharusnya diimbangi dengan situasi dan kondisi partai-partai yang ada, sehingga tidak ada unsur pemaksaan kehendak terhadap partai politik yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik baru diantara unsur-unsur politik.

Partai politik diharapkan lebih mewujudkan program-programnya dan tidak hanya janji dalam kampanye. Partai politik harus saling bekerja sama dan memahami perbedaan-perbedaan dalam rangka mewujudkan Indonesia demokratis. Mahasiswa Program

Sejarah sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat menghargai perbedaan yang ada dan terbuka satu sama lain agar tercipta kerukunan dan menghindari terjadinya perpecahan. Karena perpecahan hanya akan menghancurkan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Dokumen Selektas Partai Demokrasi Indonesia.

Arsip Nomor 211/1148/411.81/86.

Arsip Nomor: LAPSUS/1139/411.81/1986 tentang *Situasi Intern Partai Demokrasi Indonesia Kotamadya Surabaya*. Dokumen Selektas Partai Demokrasi Indonesia

Pertemuan DPP PDI dengan Mendagri, 27 Februari 1974, "Laporan Perkembangan PDI". *Piagam Perjuangan Partai*, Sub I, (A). Sub I, (C). Sub II, angka I dan seterusnya bagian I, dan seterusnya

Koran

Harian Indonesia Raya, tanggal 7 April 1971.

Kompas, 12 Januari 1973.

Kompas, 25 Maret 1977.

Kompas, 9 Juni 1977.

Merdeka, 24 Maret 1977.

Prisma, 9 September 1981.

Surabaya Post, 1 September 1976.

Surabaya Post, 12 April 1982.

Surabaya Post, 13 Oktober 1981.

Surabaya Post, 14 Desember 1981.

Surabaya Post, 15 Maret 1982.

Surabaya Post, 17 Maret 1982.

Surabaya Post, 19 Desember 1981..

Surabaya Post, 27 April 1982.

Surabaya Post, 3 Mei 1982..

Surabaya Post, 4 Mei 1982.

Surabaya Post, 5 Desember 1981.

Surabaya Post, 5 Mei 1982..

Buku

A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Affan.Gaffar. 1990. "Sistem Kepartaian yang Hegemonik dan Terobosan Demokrasi di Indonesia", Yogyakarta : FISIPOL UGM

Alfian. 1986. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia : Kumpulan Karangan*, Jakarta : Gramedia.

Ali Moertopo. 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : CSIS

Daniel Dhakiedae,. 1985. "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", Jakarta: LP3ES.

Deliar Noer. 1983. *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Perkhidmatan.

Edward L. Poelinggoman. 1992. Sumber Dan Kritik Sejarah", Makalah ini diajukan dalam kegiatan acara Pelatihan Sejarah Se-Kotamadya Ujung Pandang yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*, Nugroho Notosusanto (Penerjemah), Jakarta: Universitas Indonesia Press

Inu Syafie Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : PT. Retika Aditama.

Ipong S. Azhar. 1997. *Benarkah DPR Mandul Pemilu, Parpol, dan DPR Masa Orde Baru*, Yogyakarta : Bigrif Publishing.

Jimmy Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta :

Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Laporan DPP PDI mengenai *Pertumbuhan dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10 Januari 1973* kepada Kongres I PDI, dalam "Kongres Pertama PDI", hal 37.

Laporan resmi DPP PDI, pertemuan tanggal 17 Januari 1973 dengan Presiden disebut sebagai, "guna terbentuknya PDI serta tersusunnya MPP dan DPP PDI".

P.K Poerwantana. 1994. *Partai Politik Di Indonesia*, Rineka Cipta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

William, R. Liddle.1992. "Pemilu-Pemilu Orde Baru", Jakarta : LP3ES. William, R. Liddle. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti